

Daftar Isi

| No. | Judul Berita | Media Sumber | Page |
|-----|---|--|------|
| 1. | Bahlil Teken Aturan Ekspor Batubara Pakai Standar HBA | industri.kontan.co.id | 2 |
| 2. | Usai UU Minerba Sah, Muncul Usul RUU Hilirisasi Minerba dari DPD | bloombergtechnoz.com | 4 |
| 3. | ESDM Ungkap Potensi 35 Proyek Hilirisasi Didanai Danantara | ekonomi.bisnis.com | 6 |
| 4. | Tingkatkan Kinerja Produksi Tambang, PT Timah Gencar Adopsi Inovasi Teknologi | tambang.co.id | 8 |
| 5. | Harga Batu Bara: Gelap & Makin Suram | cnbcindonesia.com | 10 |
| 6. | Industri Pertambangan Perlu Kedepankan Aspek Keberlanjutan | investor.id | 12 |

Bahlil Teken Aturan Ekspor Batubara Pakai Standar HBA

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyetujui aturan baru terkait harga batubara acuan (HBA) untuk ekspor.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) yang telah ditandatangani oleh Bahlil tentang harga acuan untuk ekspor batubara menggunakan HBA Indonesia. Itu berarti, harga ekspor batubara tidak lagi menggunakan standar harga lainnya, seperti Indonesia Coal Index (ICI) maupun Newcastle Coal Futures.

Kejelasan mengenai penandatanganan Kepmen baru ini juga telah dibenarkan oleh menurut Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara ESDM, Julian Ambassador.

"Iya (ditandatangani) dalam Kepmen," kata dia saat dihubungi Kontan, Selasa (25/2).

Lebih detail, Julian bilang, Kepmen mengenai penggunaan HBA sebagai standar ekspor akan diluncurkan pada 1 Maret 2025 mendatang.

Sebelumnya, Bahlil menyebut ESDM akan mewajibkan eksportir batubara menggunakan HBA dalam bertransaksi.

"Tidak waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat keputusan menteri (kepmen) agar HBA dipakai untuk transaksi di pasar global," tegas Bahlil dalam konferensi pers kinerja Kementerian ESDM periode 2024, beberapa waktu lalu.

Bahlil menambahkan, alasan penggunaan HBA untuk ekspor adalah karena mayoritas volume batubara masih diekspor, ditambah total ekspor batubara Indonesia menyumbang hingga 35% kebutuhan batubara dunia.

"Total pemakaian batubara dunia itu sekitar 8 miliar ton sampai 8,5 miliar ton. Tetapi yang berada di pasar (batubara) itu sekitar 1,25 miliar ton sampai 1,5 miliar ton. Kita ekspor 500 juta ton - 550 juta ton atau sama dengan 30%-35% dari total konsumsi dunia," jelas Bahlil.

Dengan peran ekspor batubara yang cukup besar, ia mengatakan Indonesia harus bisa menentukan harga komoditas unggulannya sendiri.

"Masa harga HBA kita ditentukan oleh negara tetangga. Atau harga HBA kita dibuat lebih murah dari negara lain," ungkapnya.

Sumber: industri.kontan.co.id

Usai UU Minerba Sah, Muncul Usul RUU Hilirisasi Minerba dari DPD

WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengonfirmasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah mengusulkan beleid baru, yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) Hilirisasi Minerba.

Pada 18 Februari 2025, padahal, DPR RI baru saja mengesahkan revisi keempat terhadap Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

“Jadi *begini*; kan dari DPD itu kan ada inisiasi penyusunan undang-undang. Salah satunya adalah UU kelanjutan hilirisasi. Ya, sementara kalau kelanjutan hilirisasi kan kita harus melihat dengan regulasi yang lain,” ujar Yuliot ditemui di kompleks parlemen, usai rapat dengan DPD, dikutip Selasa (25/2/2025).

Menurut Yuliot, sebenarnya di dalam penyempurnaan UU Minerba yang baru disahkan pekan lalu, sudah terdapat klausul prioritas untuk pilihan usaha dalam rangka hilirisasi sektor pertambangan.

Jika DPD menginginkan adanya RUU lanjutan yang khusus mengatur hilirisasi minerba, lanjutnya, pihak legislatif harus melihat tata cara pemisahan undang-undang.

“Itu kan juga keberlanjutan dari hilirisasi. Jadi secara substansi masih digodok oleh DPD. Ini usulan dari DPD,” ujarnya.

Urgensi Substansi

Yuliot menilai urgensi RUU Hilirisasi Minerba harus dilihat dari substansi yang akan diatur dalam rancangan beleid tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, DPD belum menyampaikan substansi tersebut kepada pihak eksekutif atau pemerintah.

Jika pihak legislatif sudah menjabarkan substansi yang akan diatur dalam RUU tersebut, baru pemerintah bisa menelaah dan memetakan apakah sudah ada regulasi serupa yang mengatur substansi tersebut atau belum.

“Jangan sampai tumpang tindih regulasi. Jadi kalau ini regulasinya kita sudah harus menyesuaikan secara substansi, maksud dan tujuan pengaturan itu akan lebih memberikan manfaat.”

Dia pun belum bisa memberikan tanggapan apakah RUU Hilirisasi Minerba yang diusulkan DPD akan memiliki keterkaitan dan keberlanjutan dengan UU Minerba yang baru disahkan atau tidak.

“Keberlanjutan mulai dari wilayah usaha, izin usaha, hilirisasi, pengolahan sampai tahapan mana. Kemudian keberlanjutan itu kan sampai dengan industrialisasi. Jadi industrialisasinya itu sampai sejauh mana, karena ini kan secara regulasi itu kan sudah diatur semua. Jadi ruang pengaturan baru itu ya nanti akan masuk di mana? Kalau memang ada kekosongan pengaturan, ya mungkin kita akan masuk di ruang kosong pengaturan.” Sekadar catatan, dalam UU Minerba yang baru disahkan pekan lain, sebenarnya sudah terdapat beberapa klausul yang juga mengatur ihwal hilirisasi sektor pertambangan. Dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi, UU Minerba yang baru mengatur ihwal pelaksanaan pemberian WIUP/WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN atau Badan Usaha Swasta bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

“Kami berharap agar RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4/2009 tentang Minerba yang telah disepakati dapat menjawab perbaikan tata kelola, memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, mewujudkan hilirisasi bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan penerimaan negara serta yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk mewujudkan Indonesia maju dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat paripurna UU Minerba. (wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

ESDM Ungkap Potensi 35 Proyek Hilirisasi Didanai Danantara

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat potensi pembiayaan dari BPI Danantara untuk 35 proyek hilirisasi yang diusulkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional senilai US\$123,8 miliar atau setara Rp2.015,6 triliun.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, proyek yang terdiri atas sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas) bumi tersebut di antaranya akan menjadi proyek prioritas yang berpotensi mendapatkan pembiayaan Danantara.

"Salah satunya pasti kalau proyek ini menjadi prioritas, juga menjadi prioritas dari Danantara. Kalau saya kan ESDM ya, jadi dua itu [proyek minerba dan migas]," kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (25/2/2025).

Untuk itu, Dadan memastikan bahwa pihaknya terus berupaya untuk melakukan berbagai upaya agar proyek-proyek prioritas sektor minerba dan migas dapat terwujud untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Jadi, masalah nanti akan didanai atau enggak, kan Danantara ini baru berdiri kemarin, kita sekarang melakukan berbagai macam strategi supaya ini bisa kejadian," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Satgas Hilirisasi akan menawarkan 35 proyek hilirisasi baru senilai US\$123,8 miliar. Dia mengatakan, proyek hilirisasi itu terdiri atas sektor mineral, batu bara, hingga minyak dan gas (migas).

"Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan ini kita segera bisa tawarkan kepada investor potensial," ucap Yuliot.

Untuk diketahui, Kantor Kementerian ESDM akan menjadi posko dari Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas pun akan berjalan selama 5 tahun ke depan.

Dalam rapat sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sekaligus ketua satgas itu mengatakan, pihaknya tengah merumuskan langkah-langkah strategis demi meningkatkan investasi hilirisasi. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah," kata Bahlil. Editor : Denis Riantiza Meilanova

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Tingkatkan Kinerja Produksi Tambang, PT Timah Gencar Adopsi Inovasi Teknologi

UNTUK meningkatkan kinerja perusahaan, PT Timah Tbk terus berupaya mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional.

Berbagai inovasi diterapkan untuk mengoptimalkan proses penambangan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar global.

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan yakni dengan menghadirkan alat penambangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada tahun 2025, Anggota Holding Industri Pertambangan ini menghadirkan inovasi pembuatan Kapal Produksi Timah (KPT).

Kapal Produksi Timah dirancang dengan menggunakan teknologi bore hole mining namun dengan bentuk yang lebih minimalis dimana memudahkan mobilitas. Kapal ini nantinya dapat beroperasi di Perairan Dangkal mulai dari 2 mil.

dengan mobilisasi yang lebih fleksibel, KPT diharapkan dapat menjangkau cadangan timah yang spotted dan menjawab tantangan cadangan timah yang mulai berkurang, juga sebagai bentuk efisiensi Perusahaan.

Selain itu, dalam konteks lingkungan, KPT dirancang sebagai peralatan penambangan timah yang ramah lingkungan, karena menggunakan sistem bor hole mining yang tidak mengupas tanah atas namun langsung ke lapisan cadangan timah.

“Kapal Produksi Timah ini bentuk inovasi alat penambangan yang menggunakan teknologi bore hole mining namun dibuat dengan lebih minimalis dan mudah untuk dimobilisasi. Hal ini juga dioptimalkan untuk menjawab tantangan cadangan timah yang mulai berkurang. KPT ini merupakan bentuk sederhana dari Kapal Isap Produksi yang sudah digunakan sekarang,” kata Sekretaris Perusahaan PT Timah, Rendi Kurniawan.

Selain KPT, PT Timah juga melakukan inovasi terhadap Ponton Isap Produksi (PIP) yang merupakan alat penambangan timah. PIP dimodifikasi dengan melakukan mekanisasi pada beberapa peralatan.

“PIP lebih ke mekanisasi peralatan, kalau sebelumnya banyak yang dilakukan secara manual sekarang kita buat mekanisasi atau automasi sehingga nantinya bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penyesuaian ini diharapkan lebih safety, efisiensi, dan juga lebih ramah terhadap lingkungan,” sambung Rendi.

PIP ini dihadirkan untuk memudahkan melakukan penambangan di areal 2 mil ke atas, sehingga nantinya cadangan timah di areal itu bisa dimaksimalkan.

“Inovasi dua alat penambangan timah ini diharapkan dapat meningkatkan dan mendukung kinerja operasional Perusahaan. Saat ini dua alat tambang ini masih dalam tahap pembuatan yang nantinya akan segera dilakukan uji coba,” katanya.

Selain melakukan inovasi dalam peralatan tambang, PT Timah juga terus berupaya mewujudkan smart mining, dimana perusahaan mulai berbenah untuk melakukan digitalisasi penambangan.

Upaya digitalisasi yang dilakukan diantaranya dengan menghadirkan program Computerize Maintenance Management System (CMMS) yakni sistem maintenance peralatan penambangan.

Inovasi lain yang dilakukan diantaranya dengan menambahkan peralatan densitymeter pada kapal isap produksi perusahaan sebagai upaya efektivitas proses penambangan.

“Inovasi dan strategi yang diimplementasikan perusahaan merupakan langkah konkret PT Timah untuk meningkatkan kinerja produksi yang efektif, efisien dan transparan serta menjaga keberlanjutan Perusahaan,” ujar Rendi.

Upaya PT Timah dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi menunjukkan komitmen kuat untuk terus berinovasi demi meningkatkan kinerja produksi. Dengan mengintegrasikan teknologi, PT Timah tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab.

Sumber: tambang.co.id

Harga Batu Bara: Gelap & Makin Suram

HARGA batu bara kembali tertekan dan semakin mendekati level US\$100/ton pasca Pemerintah India yang fokus pada pasokan batu bara domestik dibandingkan impor.

Dilansir dari *Refinitiv*, harga batu bara pada 25 Februari 2025 tercatat sebesar US\$102,1/ton atau turun 0,87% apabila dibandingkan penutupan perdagangan 24 Februari 2025 yang sebesar US\$103/ton.

Dilansir dari *moneycontrol.com*, Pemerintah India kemungkinan besar tidak akan mewajibkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencampur batu bara impor dalam pembangkitan listrik pada musim panas ini, saat permintaan cenderung meningkat, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya.

PLTU saat ini memiliki stok batu bara yang cukup, sekitar 51 juta ton, yang dapat bertahan setidaknya 21 hari, menurut seorang pejabat senior di Kementerian Energi.

"Untuk bulan-bulan mendatang, Kementerian Energi juga yakin dapat menyediakan pasokan yang cukup bagi pembangkit listrik. Oleh karena itu, mandat pencampuran batu bara impor secara wajib tampaknya belum diperlukan saat ini," ujar pejabat tersebut kepada Moneycontrol dengan syarat anonim.

Ini akan menjadi pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun pemerintah tidak memberlakukan peraturan tersebut. Kebijakan tersebut akan mengurangi permintaan impor sehingga harga global pun tertekan. Pasalnya, India adalah konsumen terbesar batu bara kedua terbesar di dunia setelah China.

Sebagai informasi, India memiliki salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia. Batu bara domestik lebih murah untuk pembangkitan listrik, yang pada akhirnya membantu menjaga tarif listrik tetap rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, PLTU menghadapi kekurangan batu bara akibat masalah logistik. Oleh karena itu, batu bara impor yang lebih mahal digunakan untuk pencampuran. India memperkirakan rekor permintaan listrik puncak sebesar 270 gigawatt (GW) pada musim panas ini, menurut Menteri Energi Manohar Lal Khattar pada 21 Februari.

"Tahun ini, kami memiliki stok batu bara yang cukup di PLTU dan kementerian yakin dapat memenuhi permintaan puncak hingga 270 GW musim panas ini," kata Khattar kepada media di Delhi.

Kementerian Batu Bara akan memasok setidaknya 906 juta ton (MT) batu bara untuk menggerakkan PLTU India guna memenuhi permintaan puncak. Listrik berbasis batu bara tetap menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan listrik puncak tahun ini.

"Kombinasi energi untuk memenuhi permintaan musim panas ini akan tetap sama, dengan peningkatan kecil dalam porsi energi terbarukan sebesar 2-3 persen. Tahun lalu, pembangkit listrik tenaga uap menyumbang 74% untuk memenuhi permintaan puncak sebesar 250 GW.

Tahun ini, kami memperkirakan kontribusi PLTU berada di kisaran 70-74 persen. Sementara itu, kontribusi tenaga air diperkirakan tetap berada di kisaran 7-11%," kata Ketua Central Electricity Authority (CEA), Ghanshyam Prasad, kepada Moneycontrol.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pembangkit listrik berbasis batu bara impor dan gas diwajibkan beroperasi dengan kapasitas penuh selama periode kritis, Pankaj Agarwal, Sekretaris Kementerian Energi, mengatakan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada situasi.

"Saat ini, kami belum mengeluarkan perintah, tetapi jika ada kekurangan dalam memenuhi permintaan puncak, kami akan memberlakukannya jika diperlukan," ujar Agarwal, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Listrik, 2003.

Pasal 11 memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan perusahaan pembangkit listrik agar mengoperasikan dan memelihara pembangkit listrik dalam keadaan luar biasa. Pemerintah telah menggunakan ketentuan ini untuk mengeluarkan arahan kepada pembangkit listrik berbasis batu bara dan gas guna memenuhi permintaan listrik. CNBC INDONESIA RESEARCH (rev/rev)

Sumber: [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com)

Industri Pertambangan Perlu Kedepankan Aspek Keberlanjutan

PERTAMBANGAN berkelanjutan telah menjadi trend global. Setiap perusahaan tambang didorong untuk menerapkan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan operasinya. Secara sederhana term keberlanjutan dalam industri pertambangan mengacu pada praktik yang meminimalkan dampak lingkungan dalam operasi pertambangan.

“Kegiatan usaha pertambangan dewasa ini didorong untuk memperhatikan aspek tata kelola yang baik dan benar atau dikenal dengan kaidah *Good Mining Practice*. Apalagi dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin tinggi. Perusahaan tambang juga didorong untuk senantiasa memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap tahapan,” terang CEO PT J Resources Asia Pasifik, Tbk. Edi Permadi di Jakarta.

Edi menyebutkan bahwa industri pertambangan termasuk salah satu industri yang sangat kompleks. Ada lima pilar utama dalam kegiatan pertambangan yang semuanya saling berkaitan. “Kelima pilar utama itu adalah modal, teknologi, manusia (SDM), peraturan, dan sosial. Aspek-aspek keberlanjutan ini menjiwai kelima pilar utama tersebut,” ungkap Edi.

Think Globally and act Locally sangat berperan dalam kelanjutan pertambangan di Indonesia. Hal yang sangat sensitif dalam perhatian adalah mekanisme CSR, sistem kontrak dan juga supply dan juga penerimaan tenaga kerja.

Edi juga menegaskan bahwa bagian dari praktek pertambangan berkelanjutan adalah konservasi mineral. Dalam kegiatan operasi produksi, perusahaan harus menata kapasitas produksinya termasuk mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Perusahaan perlu memperhatikan neraca sumber daya dan cadangan mineral miliknya. Salah satunya berupa eksplorasi lanjutan yang harus terus dilakukan perusahaan. Eksplorasi ini menjadi nadi yang menentukan usia pertambangan,” tandas Edi.

Aspek keberlanjutan yang terus didorong ini harus diperkuat dalam regulasi. “Kegiatan pertambangan juga dikenal sebagai kegiatan yang highly regulated termasuk terkait tata kelola lingkungan. Hal yang harus didorong saat ini dan ke depan adalah penegakan hukumnya agar

aturan yang memuat kaidah pertambangan yang baik dan benar terlaksana. Sehingga kegiatan usaha pertambangan yang berkelanjutan di semua skala pertambangan terwujud,” pungkas Edi.

Dalam konteks keberlanjutan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup memiliki mekanisme penilaian terkait dengan kinerja lingkungan yang detail dan ketat yang kita kenal dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (atau PROPER). Penilaian ini dilakukan secara transparan, adil, akuntabel dan melibatkan masyarakat. Berkat Upaya maksimum dari karyawan dan management Perusahaan dan juga Kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders PT J Resources Bolaang Mangondow anak Perusahaan dari PT J Resources Asia Pasifik, Tbk mendapatkan PROPER Hijau tahun ini. Untuk Perusahaan tambang hal ini adalah pencapaian yang luar biasa.

Topang Kinerja

Secara kinerja, pada tahun 2024 perusahaan mencatat kinerja positif. Produksi emas tercatat sebesar 101 ribu oz dan dengan perkembangan proyek DOUP tahun 2027 diharapkan dapat mendekati 200 ribu oz.

“Kami sangat diuntungkan dengan komoditas emas yang kami produksi. Dengan Geopolitics sekarang ini yang masih uncertain terutama konflik antara Rusia dan Ukraina, Konflik di Gaza dan beberapa negara Timur Tengah dan perang tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump, menyebabkan safe heaven menjadi opsi yang paling logis,” terang Edi.

Di sisi lain lanjut Edi, di tengah kondisi tersebut beberapa Bank Sentral juga sedang meningkatkan cadangannya dalam bentuk emas seperti China dan juga permintaan retail perhiasan yang meningkat di India dan negara negara Timur Tengah. Ini semua memberikan sentiment positif pada pasar emas.

Harga emas terus menunjukkan grafik naik setelah 10 Februari 2025 hingga berada pada kisaran US2.900 per oz. Prediksi dari beberapa lembaga terpercaya seperti JP Morgan menyebutkan 2025 ini akan menyentuh \$ 3.000 per oz. Bahkan tahun depan, 2026 lembaga seperti InvestingHaven menyebutkan akan menyentuh \$ 3.805 per oz.

“Dengan melihat kondisi pasar emas global yang demikian saya perkirakan harga emas tahun ini bisa menyentuk \$3.500 per oz. Trend positif ini pun masih akan berlanjut di tahun berikutnya,”ungkap Edi.

Prospek harga emas yang positif ini tentu berdampak positif pula pada kinerja perusahaan tambang emas seperti PT J Resources Asia Pasifik,Tbk (PSAB).

Namun hal yang tidak kalah penting adalah kinerja lingkungan perusahaan harus sejalan dengan kinerja produksi dan juga upaya untuk menjaga agar sumberdaya dan cadangan tetap terjaga dan terkonservasi untuk kepentingan seluruh stakeholders. Editor: Euis Rita Hartati

Sumber: investor.id